

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil temuan dan analisis yang dilakukan, penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal dan menuntut adanya pengoptimalan dalam pelaksanaannya. Kondisi ini dapat disebabkan karena masih terdapat kendala di beberapa variabel dalam teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn sebagai berikut:

Pada variabel standar dan sasaran kebijakan, tujuan telah merujuk pada regulasi yang berlaku, namun belum didukung oleh indikator teknis yang terukur. Dari variabel sumber daya, kualitas sumber daya manusia relatif memadai meskipun masih terdapat keterbatasan jumlah pada fungsi tertentu, sementara sumber daya non-manusia seperti anggaran dan sarana prasarana masih menjadi kendala. Karakteristik organisasi pelaksana menunjukkan struktur yang jelas dan norma yang mengacu pada regulasi, meskipun belum didukung oleh aturan teknis yang rinci, sementara pola hubungan birokrasi antar instansi berjalan dengan baik melalui kerja sama teknis di lapangan. Pada variabel komunikasi dan koordinasi, penyampaian informasi kebijakan telah dilakukan melalui sosialisasi, namun belum sepenuhnya menghasilkan pemahaman yang seragam di masyarakat, sedangkan koordinasi antar instansi berjalan cukup baik meskipun belum terstruktur secara formal. Dari variabel sikap pelaksana, implementor menunjukkan respon yang positif, pemahaman yang cukup baik, serta komitmen dalam menjalankan kebijakan meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Sementara itu, variabel

lingkungan ekonomi, sosial, dan politik turut mempengaruhi implementasi kebijakan, di mana keterbatasan ekonomi masyarakat dan anggaran pemerintah menjadi kendala utama, kesadaran masyarakat mulai berkembang meskipun belum merata, serta dukungan politik dari pemerintah daerah sudah terlihat namun masih dalam tahap awal. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan ini berjalan dalam kondisi yang cukup dinamis, dengan adanya dukungan dari pelaksana dan hubungan antar instansi, namun masih memerlukan penguatan dalam variabel teknis, sumber daya, dan komunikasi agar pelaksanaan kebijakan dapat lebih optimal.

6.2 Saran

Berdasarkan temuan mengenai implementasi kebijakan perlindungan cagar budaya pada kawasan Kota Tua Padang yang telah peneliti paparkan di atas, berikut saran yang akan peneliti berikan agar menjadi bahan pertimbangan guna memperbaiki implementasi kebijakan kedepannya, yaitu:

1. Pemerintah daerah perlu menyusun aturan turunan berupa petunjuk teknis atau SOP sekaligus memperkuat koordinasi antar instansi melalui mekanisme yang lebih terstruktur, agar pelaksanaan kebijakan memiliki arah yang jelas dan terintegrasi.
2. Perlu peningkatan dukungan sumber daya, baik melalui penambahan tenaga pengawas maupun penyediaan sarana prasarana serta peningkatan alokasi anggaran, sehingga pelaksanaan pelestarian cagar budaya dapat berjalan lebih optimal.

3. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas komunikasi kebijakan kepada masyarakat melalui pendekatan yang lebih efektif dan interaktif, sekaligus memberikan dukungan atau insentif kepada pemilik bangunan cagar budaya yang memiliki keterbatasan ekonomi.
4. Pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat realisasi program pengembangan kawasan Kota Tua Padang sebagai bentuk konkret dari dukungan politik, sehingga kebijakan pelestarian dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.

